

KURIKULUM DALAM BINGKAI DESENTRALISASI: KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INDONESIA MASA REFORMASI

Dwi Mahdiyah¹, Ba'in², R. Soeharso³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹Email: dwimahdiyah747@students.unnes.ac.id

Abstract

This article examines the transformation of curriculum policy in Indonesia in the context of educational decentralization during the reform era. The 1998 reformation was an important turning point that drove the shift in the education system from centralization to decentralization, through strengthening the role of local governments in managing education. The curriculum as the main instrument of education has undergone significant changes along with changes in policies and the direction of national development. This study uses historical research methods with heuristic stages, source criticism, interpretation and historiography. The results of the study show that the implementation of the decentralization policy provides space for the development of a curriculum that is contextual and relevant to regional needs. However, its implementation cannot be separated from challenges such as limited human resources, inequality in access to education between regions, and dependence on central funding and policies. Therefore, synergy between the central and regional governments, as well as active participation of the community and educators, are the keys to the success of educational decentralization. The curriculum in the framework of decentralization is not only a technical tool for teaching, but also a reflection of the democratization process and efforts to improve the quality of national education in a sustainable manner.

Keywords: Curriculum, Decentralization, Education, Reform, Regional Autonomy.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang transformasi kebijakan kurikulum di Indonesia dalam konteks desentralisasi pendidikan pada masa reformasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang mendorong pergeseran sistem pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi, melalui penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Kurikulum sebagai instrumen utama pendidikan mengalami perubahan signifikan seiring perubahan kebijakan dan arah pembangunan nasional. Studi ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pengembangan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan daerah. Namun, pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan akses pendidikan antar daerah, serta ketergantungan terhadap pendanaan serta kebijakan pusat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan pendidik, menjadi kunci keberhasilan desentralisasi pendidikan. Kurikulum dalam bingkai desentralisasi tidak hanya menjadi alat teknis pengajaran, tetapi juga refleksi dari proses demokratisasi dan upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kurikulum, Desentralisasi, Pendidikan, Reformasi, Otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu hal yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi kebutuhan untuk selalu berproses dan sarana agar manusia dapat berkembang di dunia luar. Pendidikan nasional menjadi bagian dari pembangunan nasional Indonesia, tingkat pendidikan yang baik dan bermutu akan dapat membuat berbagai program reformasi untuk membangun masyarakat yang cerdas dan sejahtera, serta dapat hidup dalam *knowledge society* yang diimpikan dalam pembukaan UUD negara Indonesia (Khaeruddin, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memprioritaskan pendidikan, perubahan-perubahan selalu dilakukan untuk mengembangkan dan menjadikan pendidikan Indonesia ke kualitas yang lebih baik. Perubahan dituntut setelah runtuhnya rezim orde baru, berbagai suara menuntut haknya untuk memaksimalkan pembangunan bangsa yang lebih adil dan merata. Sistem sentralistik yang dijalankan selama orde baru dianggap tidak membawa Indonesia kearah yang lebih baik, pada masa tersebut pembangunan banyak dilakukan hanya di pusat dan daerah tertentu saja. Hal tersebut menyebabkan banyak kritikan yang muncul dan menghasilkan reformasi baru. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1977 diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang menyebabkan kewenangan pemerintahan daerah meningkat serta memberikan kebebasan dan kekuasaan, agar dapat menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga di daerahnya masing-masing. Pemerintah otonomi daerah juga memiliki kewenangan yang lebih luas, dan mencakup seluruh bidang salah satunya bidang pendidikan (Hidayat, 2007).

Kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan secara birokratik-sentralistik dan pembangunan pendidikan hanya berfokus pada pendidikan pusat, menyebabkan kondisi mutu pendidikan di Indonesia rendah dan tertinggal dari negara Asia lainnya. Pendidikan terpusat menuai banyak kritikan karena dianggap telah mengikis prinsip demokrasi Indonesia, kemudian muncul solusi dari permasalahan tersebut. Sistem sentralisasi diganti menjadi desentralisasi yang didukung dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan pendidikan secara suportif dan demokratis (Ghifari, S., Nurdiana, S., Pazila, A., & Ananda, 2024).

Pergantian pengelolaan dari sentralisasi menjadi desentralisasi memunculkan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan. Adanya implementasi undang-undang baru tersebut memberikan tantangan serta peluang bagi pendidikan daerah otonom agar dapat meningkatkan pengembangan di sekolah. Perubahan yang terjadi juga menimbulkan permasalahan baru, masalah utama yang terjadi yaitu kurangnya sumber daya manusia. Penerapan pendidikan dengan berbasis komunitas dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memenuhi kebutuhan pada setiap daerah yang berdasarkan ciri khas masing-masing daerah. Tujuan dari pendekatan tersebut agar dapat

mendorong kemajuan serta menjadikan pendidikan selaras dengan sumber daya manusia dan realitas masyarakat (Idris, M., & Tolla, 2024).

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri kemudian digantikan oleh BJ Habibie dan dimulainya masa reformasi, pendidikan mempunyai ruang yang besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat revolusioner dan reformatif. Pada masa reformasi posisi pendidikan diperkuat sebagai sarana pembangunan manusia yang integral. Pendidikan tidak hanya sebagai transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dan pembentukan karakter bangsa. Dalam proses pembangunan pendidikan, terdapat instrumen yang menopang sistem tersebut yaitu kurikulum. Kurikulum yang merupakan program dalam sistem pendidikan mempunyai fungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kurikulum memuat berbagai garis besar program kegiatan yang harus dijalankan oleh penyelenggara pendidikan. Kurikulum biasanya berisikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa ketika duduk di bangku sekolah (Setyaningsih, 2022).

Kurikulum menjadi salah satu proses dalam pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku, kemudian juga dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran tenaga pendidik maupun siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat diartikan sebagai kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima oleh siswa dengan upaya dan tanggung jawab sekolah. Isi dari kurikulum juga tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, namun juga seluruh kegiatan belajar, pengalaman siswa di sekolah, bersama dengan guru atau tidak, berkenaan langsung dengan pelajaran atau tidak, dengan tujuan untuk mencapai hasil pengalaman belajar bagi siswa. Kurikulum mencakup kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, adanya kurikulum ini juga untuk merangsang anak supaya belajar di dalam maupun di luar kelas (Aini, A. Q., & Wiyah, 2024).

Kurikulum sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai media untuk menentukan pembaruan pendidikan, dan hendaknya dapat mengembangkan potensi siswa. Pengembangan kurikulum dapat melalui berbagai pendekatan dan metode sesuai dengan kebutuhan pendidikan, tujuan, masalah serta filosofis pendidikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana transformasi kebijakan kurikulum masa reformasi, implementasi desentralisasi dalam pengelolaan kurikulum, serta tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum desentralisasi. Namun, ruang lingkup tulisan ini dibatasi hanya menganalisis pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan yang dikaitkan pada sistem kurikulum, dan tantangan yang dihadapi pada masa reformasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu suatu sistem dengan melalui berbagai tahapan untuk mencapai suatu kebenaran sejarah (Wasino, 2018). Beberapa tahapan yang digunakan dalam penyusunan tulisan sejarah yaitu yang pertama mengumpulkan berbagai sumber atau heuristik, terdapat dua sumber antara lain sumber primer yang didapat dari koran serta arsip arsip yang sezaman dan sumber sekunder yang menggunakan studi literatur yang di dapat dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku buku, dan dokumen yang membahas desentralisasi pendidikan masa reformasi. Tahapan kedua yaitu kritik sumber, untuk mengetahui kredibilitas dan autentikasi sumber yang diperoleh. Tahapan ini berisi kritik internal dan kritik eksternal.

Dalam kritik internal telah dilakukan proses identifikasi karya-karya terdahulu serta membandingkan dengan isi jurnal yang ditemukan hingga menghasilkan penulisan terbaru dan menghindari plagiasi Setelah itu sumber yang telah diperoleh kemudian diinterpretasi, merekonstruksi sumber menjadi peristiwa sejarah. Pada tahapan ini telah dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta dari data yang telah ditemukan. Setelah itu, dianalisis dan dijabarkan fakta-fakta tersebut sehingga dapat menghasilkan penyatuan dari hasil analisa. Kemudian tahapan terakhir historiografi yaitu peristiwa yang telah dihubungkan dideskripsikan menjadi tulisan sejarah yang dilandasi sikap objektif dan mendekati kebenaran. Hal ini berkaitan dengan cara pemaparan penelitian berdasarkan sumber dan fakta-fakta yang ada. Dalam historiografi, penulis harus memahami konsep-konsep kepenulisan sejarah, seperti penyusunan struktur penulisan secara jelas dan mudah dipahami, penulisan ini biasanya diawali dengan pendahuluan, dilanjut dengan pembahasan yang membahas mengenai sistem kurikulum dalam kebijakan desentralisasi pendidikan masa reformasi (Kuntowijoyo, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Masa pemerintahan reformasi merupakan masa perbaikan segala sistem dan kebijakan pemerintahan, yang sempat kacau pada masa orde baru. Pendidikan menjadi hal yang diprioritaskan, berbagai hal dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia masa itu. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu ada empat kebijakan pendidikan, diantaranya 1). Peningkatan mutu pendidikan, 2). Efisien pengelolaan pendidikan, 3). Relevansi pendidikan, dan 4). Pemerataan pelayanan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka pemerintah mengeluarkan kurikulum sebagai penunjang dalam pendidikan. Dari masa ke masa suatu kurikulum pendidikan selalu berubah-ubah menyesuaikan zaman, seperti masa reformasi (Mukodi, 2016). Kurikulum masa reformasi akan berbeda dengan masa-masa sebelumnya, berbagai kebijakan baru dicetuskan oleh pemerintah. Pada masa reformasi suatu kebijakan pendidikan mengalami

perubahan beberapa kali, dengan tujuan agar perubahan tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman yang sangat pesat. Selain itu pengembangan lokalitas menjadi arah pendidikan di masa reformasi, dengan sasaran pendidikannya ialah masyarakat suatu daerah dilingkungan sekolah itu sendiri (Hartono, 2016).

Pada awal masa reformasi, kurikulum yang digunakan masih sama seperti tahun 1997, yang pelaksanaan kurikulumnya masih cenderung kepada penguasaan materi. Kurikulum ini juga menjadi penyempurna dari kurikulum 1994 pada waktu itu, yang dilaksanakan bertahap untuk pendidikan dasar dan menengah yaitu dengan tahap penyempurna jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu masa pemerintahan B.J Habibie dibebaskannya SPP untuk SD hingga SMTA dan memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juta siswa, untuk lingkungan kampus dibebaskan nya intervensi dan pengaruh dari luar (Nurwahyuni, K., & Hudaidah, 2021). Pada masa pemerintahan Gus Dur lebih dikenal dengan perimbangan keuangan pusat dan meningkatnya gaji guru secara signifikan, kemudian peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik membuat tenaga pendidikan mampu berfungsi dengan optimal. Selain itu juga dilakukan pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dengan didukung sarana prasarana yang memadai (Khaeruddin, 2022)..

Pada tahun 2004 ketika masa pemerintahan Megawati disusunlah kurikulum baru yang berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini menjadi penyempurna dari kurikulum 1997. Kurikulum ini memperhatikan fleksibilitas, di mana pertimbangan utama guru dalam pembelajaran ialah kemampuan siswa, sehingga siswa menjadi center sedangkan guru sebagai fasilitator, pendamping, dan rekan dalam melakukan eksplorasi. Metode pendekatan yang bisa digunakan yaitu dapat diperoleh dari berbagai sumber lain tidak hanya dari guru saja, dan siswa dapat berdiskusi untuk mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan baru. Setelah diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi, tak lama kemudian terjadi perubahan kurikulum lagi (Widya Ayuningtyas, 2023).

Pada tahun 2006 yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diubahlah kurikulum baru menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang dianggap lebih mampu menjawab tantangan yang lebih jelas serta memberikan muatan lokal kepada berbagai lembaga pendidikan. Setelah tahun 2013 dengan presiden yang sama disusunlah kurikulum baru, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dan berinflikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan serta kurangnya penguasaan keterampilan, sedangkan pada kurikulum baru 2013 ini capaian tujuan lebih menekankan pada tiga aspek yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Septian, R. N., & Apriliani, 2022)

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelum-sebelumnya, dan dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No. 69 tahun 2013. Pada dasarnya kurikulum 2013 mengupayakan penyederhanaan dan tematik integratif serta menyiapkan agar dapat mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Tujuan utama dari kurikulum ini yaitu untuk mendorong siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bernalar, bertanya, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh dari materi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya kurikulum ini juga mendorong lokalitas pendidikan, serta sekolah dan guru dapat mengembangkan standar kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, di mana bentuk silabus dan penilaiannya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungannya. Selain itu, pada kurikulum ini unsur praktis lebih diutamakan daripada unsur teoritisnya. Namun kurikulum pada masa ini juga belum dapat merubah pendidikan ke arah yang lebih baik dan belum dapat disimpulkan berhasil (Tampubolon, R., Gulo, Y., & Nababan, 2022).

Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Kurikulum

Kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan mempunyai tujuan utama yaitu agar pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan khas dan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan agar menciptakan pendidikan yang berkualitas, tidak segampang itu. Namun, pemerintah tetap mengupayakan berbagai sistem untuk mewujudkan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Desentralisasi pendidikan mengakomodasi keberagaman kurikulum sesuai khas lokal, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan yang sesuai potensi daerah. Pemerintah daerah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas-tugas pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam aspek pendidikan (Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, 2022).

Kebijakan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan pengembangan otonomi daerah. Kedua harapan tersebut, mencakup dengan melalui pelatihan guru serta pengelolaan sumber daya, pemberdayaan sekolah-sekolah daerah, dan penetapan kebijakan kurikulum. Pengembangan otonomi pendidikan daerah yang dilakukan akan dapat memperbaiki pelayanan, sumber daya, organisasi serta kinerja pendidikan pada tingkat daerah. Pemerintah daerah merespon kebijakan desentralisasi dengan lebih cepat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, merespon kebutuhan khusus untuk pendidikan, dan menciptakan iklim pembelajaran yang lebih adaptif. Sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat menunjukkan sejumlah implikasi yang positif (Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, 2024).

Pada masa sebelumnya, sistem pendidikan di Indonesia dapat dikatakan kurang optimal. Pemerintahan daerah yang tidak dapat menyelesaikan masalah internal dan

mengakomodir konflik lokal, menciptakan rasa ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya rasa kemandirian terhadap pengelolaan pemerintah, sistem pendidikan juga terkena dampak. Tidak adanya inovasi, energi kreasi dan kebebasan pembelajaran di tingkat daerah, dikarenakan pengelolaan selalu bergantung ke pusat. Maka dari itu, diubahlah kebijakan pemerintah yang mula nya sentralisasi menjadi desentralisasi.

Sistem desentralisasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa berbagai permasalahan kompleks, dapat diatasi dengan cara kerja kelompok. Sistem ini juga lebih fleksibel dalam merespon perubahan yang terjadi dengan cepat. Kemudian dapat melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan efektif, dan menciptakan sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang produktif dalam pendidikan. Desentralisasi yang sudah menjadi wewenang dalam undang-undang, mengharuskan sekolah agar dapat mempunyai kesiapan untuk menyiapkan pelaksanaan operasional dan menjadi lembaga formal pendidikan. Pelaksanaan sistem ini juga menuntut pemerintah daerah untuk penerapan pendidikan berjalan secara mandiri, dari yang awalnya dikelola oleh pusat. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dimulai dari penetapan perubahan kurikulum, yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Metode dan model yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini yaitu, Model Berbasis Sekolah dengan terdapat berbagai kurikulum (Nuradhawati, 2019).

Pelaksanaan revisi serta uji coba Kurikulum Berbasis Kompetensi telah dilakukan untuk meningkatkan relevansi kurikulum. Kurikulum ini didasarkan pada penguasaan yang kognitif serta memperkuat peran guru-guru, masyarakat serta orang tua. Pelaksanaan kurikulum pada kebijakan desentralisasi, lebih menekankan keterlibatan para warga sekolah seperti kepala sekolah, guru dan staf sekolah lainnya dalam pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang yang tepat akan menciptakan hasil pembelajaran yang berkualitas, seperti halnya model *School-based Management*. Penerapan model tersebut akan menciptakan kinerja sekolah yang baik, serta adanya otonomi secara luas di lingkungan sekolah dan sekolah diharuskan mengembangkan program pendidikannya (Simanjuntak, 2015).

Untuk mengembangkan pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang sejahtera, tidak hanya dengan transformasi pemikiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, terdapat campur tangan masyarakat dan para pendidik yang dapat melancarkan keberlangsungan kebijakan tersebut. Artinya, untuk menciptakan mutu desentralisasi yang efektif harus dikembangkan oleh pemerintahan yang bertanggung jawab, agar sistem desentralisasi bekerja dengan baik dan mensejahterakan (Kholis, 2000).

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Desentralisasi

Selama pelaksanaan kurikulum, kebijakan desentralisasi terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Tantangan utama yang dihadapi yaitu kurangnya sumber

daya manusia yang sudah terlatih ditingkat daerah, dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat kompeten di tingkat daerah. Peningkatan kapasitas tenaga pendidikan serta penyediaan pendidikan dan pelatihan yang memadai, menjadi tantangan bagi pemerintah. Maka dari itu, diperlukan investasi yang cukup untuk mengembangkan sumber daya manusia agar tenaga pendidik dapat mengelola pendidikan dengan sangat baik di tingkat daerah (Rahim, 2022).

Perbedaan kualitas pendidikan antar daerah akan membuat kemajuan pendidikan berjalan lambat, pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan menyebabkan perbedaan konsistensi dan kualitas. Kemandirian setiap daerah dalam mengembangkan kurikulum, akan membuat perbedaan kurikulum di setiap daerahnya. Oleh karena itu, adanya mekanisme pengawasan serta evaluasi yang efektif dalam desentralisasi pendidikan sangat penting, agar konsistensi dan kualitas pendidikan dapat terjaga. Selain itu monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara ketat dalam pengawasan kinerja pendidikan pada setiap daerah juga diperlukan. Hal tersebut untuk memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam pengumpulan data, menganalisis hasil serta pemberian umpan balik untuk membantu pengambilan keputusan dan memperbaiki sistem pendidikan menjadi lebih baik (Siregar, 2021).

Pembiayaan pendidikan yang masih bergantung kepada dana pemerintah pusat ataupun provinsi. Meskipun pemerintah memberikan dana negara pada aspek pendidikan lebih banyak, tidak dapat dipungkiri jika pendanaan terhadap kebutuhan pendidikan di setiap daerah terjadi kekurangan. Terlebih ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat, membuat otonomi keuangan daerah dalam menyelenggarakan berbagai sistem di pendidikan masih terbatas. Kemudian adanya kesenjangan akses pendidikan dan ketimpangan sumber daya menjadi hal tersendiri yang perlu diatasi. Adanya perbedaan tingkat sumber daya pada setiap daerah, menjadi tantangan bagi pemerintah. Terdapat daerah yang mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan pendidikan, namun juga ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan, sehingga membuat terhambatnya pendidikan yang berkualitas. Pemerintah harus mengatasi ketimpangan yang terjadi agar seluruh daerah memiliki akses pendidikan berkualitas yang sama (Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, 2024).

Selain itu agar kebijakan desentralisasi pendidikan dapat berjalan dengan baik, sangat diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Koordinasi yang dilakukan antara keduanya harus baik, maka dari itu harus dipastikan adanya koordinasi yang efektif untuk mengembangkan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta distribusi sumber daya pendidikan. Kolaborasi yang terjalin dengan baik akan menghindarkan tumpang tindih kebijakan dan program yang tidak efisien, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketimpangan dan keberagaman yang terjadi merupakan hal yang umum terjadi. Namun, bagaimana hubungan dan komunikasi yang terjalin antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan menentukan pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang berkualitas. Sebab desentralisasi pendidikan merupakan proses transfer otoritas serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, 2022).

Perbedaan yang terjadi dikarenakan, pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam mengembangkan pendidikan dan menentukan kebijakan di setiap daerah nya. Kebutuhan yang diperlukan pada setiap daerah juga berbeda, sehingga pendidikan disesuaikan dengan konteks setempat. Namun, pemerintah pusat tetap mengawasi dan memastikan bahwa kurikulum yang digunakan pada setiap daerah tetap mengikuti standar nasional yang sudah ditetapkan. Adanya standar nasional dalam pendidikan, untuk memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Tugas pemerintah pusat yaitu menyusun kerangka kerja untuk mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, meskipun terdapat keberagaman dan perbedaan kurikulum pendidikan (Rahim, 2022).

Permasalahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal akan berdampak juga kepada faktor internal. Dalam hal ini, yang harus dihadapi pemerintah selain faktor eksternal juga ada faktor internal. Para pelaksana pendidikan, yang mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan, belum dapat menjalankan peran dan fungsinya sepenuhnya dengan baik. Apabila para pelaksana pendidikan dapat menjalankan perannya dengan sangat baik, maka pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan berkualitas (Pasandaran, 2004).

KESIMPULAN

Masa reformasi menjadi titik balik penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam peralihan dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi. Transformasi sistem pendidikan Indonesia pada masa reformasi, menunjukkan adanya upaya serius untuk membenahi sistem pendidikan yang terlalu sentralistik pada masa sebelumnya. Desentralisasi pendidikan memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik lokal. Pendidikan pada masa reformasi dipandang sebagai sarana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, yang tidak hanya berfungsi sebagai media transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter bangsa, pembangunan sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi. Salah satu aspek penting dalam reformasi pendidikan yaitu penerapan kebijakan desentralisasi dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum. Transformasi kebijakan kurikulum dari masa ke masa menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan pemerataan pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diharapkan, dapat menjawab tantangan keberagaman dengan memberikan ruang untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam praktiknya kebijakan ini telah menerapkan berbagai kurikulum

untuk mensejahterakan pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan di daerah, serta berbagai sistem dan kebijakan untuk mendorong pendidikan ke arah yang lebih baik. Desentralisasi pendidikan bukan hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, para pendidik, dan masyarakat. Selain itu kurikulum dalam bingkai desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam pendidikan, tetapi juga wujud konkret dari demokratisasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. Q., & Wiyah, A. (2024). SISTEM KURIKULUM YANG DITERAPKAN MASA REFORMASI. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*.
- Ghifari, S., Nurdiana, S., Pazila, A., & Ananda, R. (2024). SENTRALISASI PENDIDIKAN DAN DESENTRALISASI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 3326–3336.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(1), 35–45. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.879>
- Hidayat, D. (2007). KEBIJAKAN DESENTRALISASI BIDANG PENDIDIKAN. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(3), 334–339.
- Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1494–1505.
- Khaeruddin, & R. (2022). ERA REFORMASI: TITIK BALIK PENDIDIKAN INDONESIA. *Nubin Smart Journal*, 2(2), 16–25.
- Kholis, N. (2000). Pengembangan Kurikulum dalam Era Desentralisasi Pendidikan. *Digilib UINSA*.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mukodi. (2016). REFLEKSI DINAMIKA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Profesi Pendidik*, 3(2), 141–152.
- Nuradhawati, R. (2019). DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Nurwahyuni, K., & Hudaidah, H. (2021). Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia dari Masa ke Masa: Sebuah Studi Literatur. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 53–59.
- Pasandaran, S. (2004). Desentralisasi Pendidikan dan Masalah Pemberdayaan Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 11, 115–129.
- Rahim, A. (2022). PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN NASIONAL DAN

- IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM. *FIKRUNA*, 4(2), 1–22.
- Septian, R. N., & Apriliani, S. L. (2022). STUDY KOMPARASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA REFORMASI DENGAN ERA INDUSTRI 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 924–933.
- Setyaningsih, K. (2022). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76–94.
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130.
- Siregar, E. S. (2021). DAMPAK REFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA DI ABAD 21. *Jurnal Guru Kita PGSD*, 5(4), 123. <https://doi.org/10.24114/jgk.v5i4.28403>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51.
- Tampubolon, R., Gulo, Y., & Nababan, R. (2022). (2022). PENGARUH REFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN INDONESIA TEHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 389.
- Wasino, & E. S. H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan*. Magnum Pustaka Utama.
- Widya Ayuningtyas, K. (2023). *Pendidikan Era Reformasi*. Kompasiana.